

Sikap politik perempuan pada Pemilu legislatif tahun 2019

Ayu Sekar Ndini^{1*}, M. Japar², Agus Martono³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta

*E-mail: ayusekarn@gmail.com

Abstract: This study aims to obtain empirical data about the relationship between political attitudes and women's political participation in the 2019 legislative elections. The method used is explanatory research methods. The population of this study was 241 and the sample used was 84 people from 20% of the population. The sampling technique uses simple random sampling. The product-moment correlation hypothesis test that produces a correlation coefficient of 0,429 and r-table for 84 respondents is 0,215 with a confidence level of 95%. With the coefficient of determination obtained at 18,4%. In conclusions, there is a positive relationship between political attitudes and women's political participation in the 2019 legislative election at Srengseng, Kembangan, West Jakarta.

Keywords: Women's political attitudes, women's political participation, 2019 legislative elections.

PENDAHULUAN

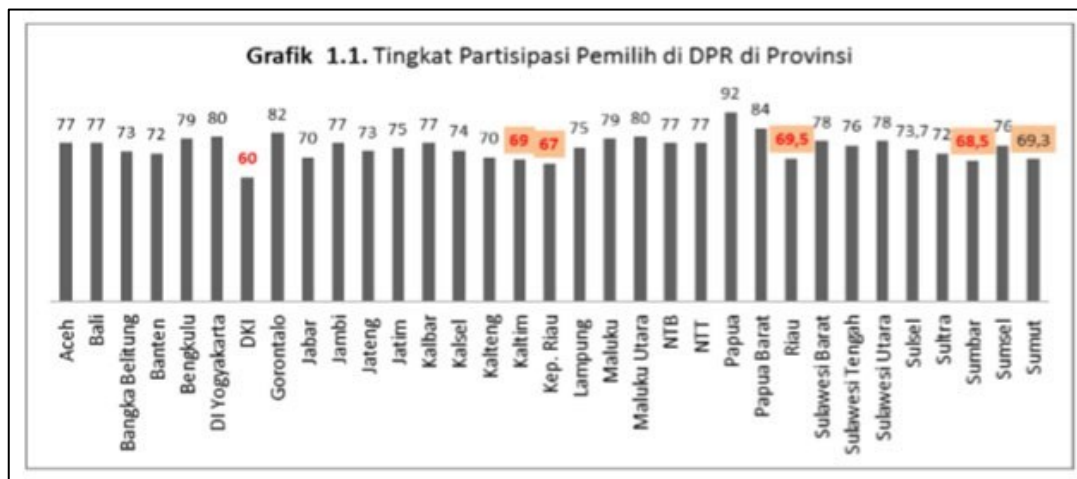
Indonesia adalah negara demokrasi di mana keputusan legislatif diambil oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat berdasarkan asas demokrasi. Pemilihan Umum Legislatif, yang dilaksanakan setiap lima tahun, melibatkan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Demokrasi mengharuskan adanya kesetaraan politik, di mana setiap pemilih memiliki hak yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, etnis, atau status sosial. Salah satu tantangan adalah menghapus stigma bahwa perempuan sering mengikuti preferensi politik keluarga atau suami, yang dapat menghambat pencapaian pemilu yang berintegritas. Untuk itu, sikap politik yang ideal dan rasional sangat penting, terutama bagi perempuan.

Pemilu adalah salah satu cara yang mudah diukur untuk menilai partisipasi politik. Tingkat partisipasi politik yang tinggi menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam isu-isu politik. Menurut Khoirudin (2010), sikap politik adalah kesiapan bertindak seseorang dalam merespons masalah politik. Sementara itu, Damsar (2010) menjelaskan partisipasi politik sebagai keterlibatan dalam kegiatan terkait kekuasaan, pemerintah, dan kebijakan.

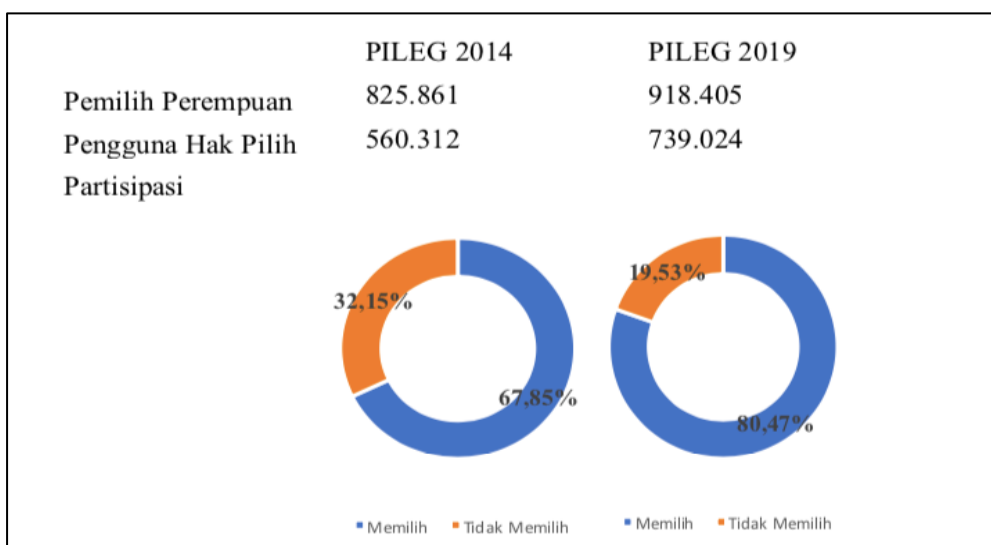
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan fluktuasi dalam tingkat partisipasi pemilih dari tahun ke tahun. Pada Pemilu 1999, partisipasi pemilih mencapai 92,7%, namun menurun menjadi 84,1% pada tahun 2004 dan 71% pada tahun 2009. Pemilu 2014 menunjukkan sedikit peningkatan dengan 75,11%, dan Pemilu 2019 melonjak tajam menjadi 81,69%. Meskipun tidak mempengaruhi keabsahan hasil pemilu, tingkat partisipasi mencerminkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.





Gambar 1. Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Legislatif 2014

Di DKI Jakarta, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019 menunjukkan perbedaan signifikan. Pada Pemilu Legislatif 2014, partisipasi perempuan di Jakarta Barat adalah 67,85%, sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 80,47%. Kenaikan ini menunjukkan perubahan signifikan dalam keterlibatan politik perempuan di wilayah tersebut.



Gambar 2. Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 dan Pemilu Legislatif 2019 di Jakarta Barat

Menurut Khoirudin (2010, p. 35) terdapat tiga faktor yang memengaruhi sikap politik, yaitu pertama, komponen kognitif yang menyangkut pengetahuan tentang politik dan kepercayaan pada politik, dan peranan perempuan dalam mengetahui partai politik. Kedua, komponen afektif yang menyangkut preferensi politik. Ketiga, komponen evaluatif yang menyangkut kemampuan untuk sadar politik dan melibatkan diri dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan fenomena di atas dapat diketahui bahwa sikap politik menjadi sangat penting dalam menilai sejauh mana partisipasi politik perempuan Jakarta Barat. Penelitian mengenai hubungan sikap

politik dengan partisipasi politik perempuan ini menjadi sangat menarik untuk di teliti karena merupakan kajian pada momentum yang tepat dalam pesta demokrasi. Karena penelitian sebelumnya berfokus pada berbagai aspek partisipasi politik masyarakat, seperti pengaruh latar belakang sosial ekonomi, faktor psikologis, dan kepercayaan terhadap kandidat, serta faktor-faktor seperti politik uang, media massa, dan pendidikan politik. Namun, penelitian-penelitian ini umumnya tidak secara spesifik membahas sikap politik perempuan atau bagaimana preferensi politik perempuan mempengaruhi partisipasi politik mereka dalam pemilu. Penelitian yang dilakukan saat ini memiliki perbedaan penting, yaitu fokus pada sikap politik perempuan dan bagaimana sikap ini memengaruhi partisipasi mereka dalam pemilu legislatif. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi celah (*gap*) yang ada dalam penelitian sebelumnya dengan menyoroti hubungan antara sikap politik perempuan dan partisipasi politik mereka, khususnya di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami dinamika partisipasi politik perempuan yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu. Maka dari itu, akan sangat menarik untuk di teliti lebih mendalam. Uraian latar belakang permasalahan tersebut menjadikan penelitian ini dengan judul “Hubungan Sikap Politik dengan Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) Tahun 2019 di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat”.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses politik yang bertujuan memengaruhi keputusan-keputusan pemerintahan. Menurut Damsar (2010, pp. 179-180), partisipasi politik mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintahan, negara, konflik dan resolusi konflik, kebijakan, pengambilan keputusan, serta distribusi atau alokasi sumber daya.

Keith Fauls menegaskan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan aktif dari individu atau kelompok dalam proses pemerintahan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan maupun oposisi terhadap pemerintah. Herbert McClosky, dalam buku Damsar, mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela warga masyarakat untuk turut serta dalam proses pemilihan penguasa dan pembentukan kebijakan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson menyatakan bahwa partisipasi politik mencakup tindakan warga negara untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, yang bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisasi atau spontan, damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, dan efektif atau tidak efektif.

Budiarjo menjelaskan partisipasi politik sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan politik yang sah oleh masyarakat, di mana anggota masyarakat berpartisipasi dengan keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama, kepentingan mereka akan tersalur atau diperhatikan. Konsep ini menekankan bahwa partisipasi politik adalah indikator keberhasilan pendidikan politik masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat pelaksanaan demokrasi.

Cholisin dan Nasiwan (2012, p. 146) menegaskan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, dan dalam negara demokratis, konsep ini didasari oleh kedaulatan rakyat.

Menurut Trubus Rahardiansah (2012, pp. 285-286) dan Wirangani (2017, p. 35), partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam berbagai proses politik, mulai dari pembuatan keputusan hingga pelaksanaannya, termasuk dalam penilaian keputusan tersebut. Ini melibatkan warga dalam semua tahapan kebijakan, bukan sekadar mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh para pemimpin.

Dalam konteks partisipasi politik perempuan, beberapa isu utama yang relevan meliputi:

1. **Hak-hak Memilih:** Hak perempuan untuk memilih dan dipilih adalah aspek fundamental dari partisipasi politik yang memungkinkan mereka untuk berkontribusi pada pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum dan proses politik lainnya penting untuk memastikan suara mereka didengar dan mempengaruhi hasil pemilihan.
2. **Sikap Politik:** Sikap politik perempuan mencerminkan pandangan dan prioritas mereka terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan politik. Sikap ini sering dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam masyarakat, dan dapat mempengaruhi cara mereka berpartisipasi dalam politik.
3. **Kesetaraan:** Upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam representasi politik dan pembuatan kebijakan sangat penting. Ini mencakup dorongan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memegang posisi kekuasaan, sehingga perspektif mereka dapat dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan.
4. **Berpartisipasi dalam Proses Politik:** Keterlibatan aktif perempuan dalam berbagai bentuk partisipasi politik, seperti bergabung dengan partai politik, mengikuti kampanye, atau terlibat dalam organisasi masyarakat sipil, adalah kunci untuk memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan perempuan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, partisipasi politik perempuan tidak hanya penting untuk mencapai representasi yang adil, tetapi juga untuk memperkaya proses demokrasi dengan perspektif yang lebih luas dan beragam.

Bentuk – Bentuk Partisipasi Politik

Berdasarkan Damsar (2010, pp. 188-189) yang mengacu pada pandangan Samuel P. Huntington dan Juan M. Nelson, bentuk-bentuk partisipasi politik meliputi:

1. **Kegiatan Pemilihan:** Termasuk suara dalam pemilu, sumbangan kampanye, bekerja dalam pemilihan, atau mencari dukungan bagi calon tertentu.
2. **Lobbying:** Upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah guna memengaruhi keputusan mengenai persoalan publik.
3. **Kegiatan Organisasi:** Partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam organisasi yang tujuannya mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
4. **Mencari Koneksi (Contacting):** Tindakan individu yang ditujukan pada pejabat pemerintah untuk mendapatkan manfaat pribadi atau kelompok kecil.
5. **Tindakan Kekerasan (Violence):** Upaya untuk memengaruhi keputusan pemerintah melalui tindakan kekerasan terhadap orang atau properti.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Menurut Myron Weiner (Rahardiansah, 2012, pp. 286-287), beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik meliputi:

1. **Modernisasi:** Perkembangan modernisasi di berbagai bidang kehidupan mendorong masyarakat untuk lebih banyak menuntut keterlibatan dalam kekuasaan politik.
2. **Perubahan Struktur Kelas Sosial:** Perubahan dalam struktur kelas sosial mempengaruhi pola partisipasi politik dan hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan.
3. **Pengaruh Intelektual dan Komunikasi Massa Modern:** Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru, meskipun modernisasi dan industrialisasi belum sepenuhnya matang.
4. **Konflik Antar Kelompok Pemimpin Politik:** Konflik antar elit politik seringkali menarik dukungan rakyat, yang berujung pada perluasan hak pilih.

5. **Keterlibatan Pemerintah yang Meluas:** Keterlibatan pemerintah yang semakin besar dalam urusan sosial, ekonomi, dan budaya seringkali merangsang tuntutan untuk lebih banyak partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Menurut Surbakti (2010, p. 316), partisipasi politik dipengaruhi oleh sikap politik warga negara, yang dapat bersifat pasif atau aktif. Partisipasi pasif melibatkan dukungan rendah atau menjadi simpatisan, sedangkan partisipasi aktif mencakup kegiatan politik konvensional seperti pemilu dan kampanye, serta nonkonvensional seperti demonstrasi dan mogok.

Indikator Partisipasi Politik

Menurut Almond dalam Damsar (2010: 186), bentuk Partisipasi Politik sebagai indikator Partisipasi Politik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Indikator Partisipasi Politik

Konvensional
Pemungutan suara
Diskusi Politik
Kegiatan kampanye
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif

Sumber: Pengantar Sosiologi Politik (Damsar, 2010)

Partisipasi Politik dalam Pemilu Legislatif

Indonesia, sebagai negara demokrasi, melaksanakan pemilihan umum (pemilu) sebagai salah satu ciri utamanya. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah mekanisme demokrasi yang memberikan hak pilih kepada setiap individu untuk menentukan siapa yang pantas mengisi jabatan politik tertentu. Pemilihan Umum Legislatif, khususnya, adalah proses langsung yang diadakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Proses ini harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hak pilih universal memastikan bahwa semua pemilih memiliki kesetaraan politik tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, etnis, atau status sosial, yang menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk perempuan, untuk mencapai integritas pemilu.

Damsar (2010) menjelaskan bahwa partisipasi politik melibatkan keterlibatan individu dalam kegiatan terkait kekuasaan, kewenangan, pemerintahan, dan pembuatan kebijakan. Kesetaraan politik, menurut Damsar (2010) dan Haboddin (2016), mencakup hak dan kewajiban yang setara antara laki-laki dan perempuan, serta peluang hukum yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik mendukung prinsip kesetaraan ini dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang bebas dan rahasia.

Pemilu bukan satu-satunya bentuk partisipasi politik, namun merupakan indikator yang mudah diukur melalui tingkat partisipasi pemilih. Pada negara demokratis, partisipasi politik yang tinggi mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan respons mereka terhadap isu-isu politik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur tentang asas dan tahapan penyelenggaraan Pemilu, termasuk perencanaan, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran peserta, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilu. Pemilu Legislatif menggunakan sistem proporsional terbuka untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Konsep Sikap Politik

Sikap politik adalah kesiapan individu atau kelompok untuk bertindak berdasarkan pandangan mereka terhadap isu-isu politik yang mempengaruhi kepentingan umum. Surbakti (2010) mendefinisikan sikap sebagai keinginan untuk mewujudkan gambaran ideal dalam angan-angan, sedangkan Gerungan (2010) menjelaskan sikap sebagai pandangan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai objeknya. Prawira (2014) menambahkan bahwa sikap mencerminkan cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain atau masalah tertentu, dan Secord & Backman mendefinisikan sikap sebagai keteraturan dalam perasaan, pemikiran, dan predisposisi tindakan terhadap aspek lingkungan.

Dalam politik, sikap politik melibatkan bagaimana individu merespons dan bertindak terhadap masalah politik, yang bisa bersifat positif atau negatif. Menurut Gerungan (2010), ciri-ciri sikap meliputi:

1. **Pembentukan Sikap:** Sikap tidak dibawa sejak lahir tetapi dibentuk melalui pengalaman dan pembelajaran.
2. **Perubahan Sikap:** Sikap dapat berubah sesuai dengan kondisi dan pengalaman baru.
3. **Relasi dengan Objek:** Sikap selalu terkait dengan objek tertentu dan dapat berkisar pada satu objek atau kumpulan objek.
4. **Motivasi dan Perasaan:** Sikap mencakup aspek motivasi dan perasaan, membedakannya dari pengetahuan atau kecakapan semata.

Dengan pemahaman ini, sikap politik perempuan dalam pemilu legislatif mencerminkan bagaimana mereka memandang dan berpartisipasi dalam proses politik, mempengaruhi cara mereka menggunakan hak pilih dan berkontribusi pada pembuatan keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka dan masyarakat secara keseluruhan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Politik

Sikap seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikelompokkan menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal mencakup interaksi langsung antara individu dalam kelompok dan interaksi dengan hasil kebudayaan yang disebarluaskan melalui media komunikasi seperti surat kabar, radio, dan televisi. Interaksi ini membentuk dan memodifikasi sikap melalui pengaruh yang diterima dari luar diri seseorang. Komunikasi juga berperan dalam mempengaruhi sikap dengan adanya pengaruh langsung dari satu pihak yang dapat membentuk pandangan dan sikap individu.

Di sisi lain, faktor internal mencakup selektivitas dan minat pribadi dalam menerima dan mengolah pengaruh eksternal. Individu memilih informasi yang sesuai dengan motif dan sikap yang sudah ada dalam dirinya. Faktor-faktor internal ini memainkan peran penting dalam bagaimana seseorang memproses informasi dan membentuk sikapnya.

Menurut Azwar (2012), ada beberapa faktor tambahan yang mempengaruhi sikap, yaitu:

1. **Pengalaman Pribadi:** Pengalaman langsung dan emosional dengan suatu objek psikologis berkontribusi pada pembentukan sikap, dengan pengalaman yang melibatkan emosi lebih cenderung membentuk sikap yang mendalam dan bertahan lama.
2. **Pengaruh Orang Lain yang Dianggap Penting:** Individu cenderung mengikuti sikap orang-orang yang dianggap penting dalam hidup mereka, sebagai upaya untuk berafiliasi dan menghindari konflik.
3. **Pengaruh Kebudayaan:** Kebudayaan membentuk pola pengalaman dan sikap terhadap berbagai masalah dalam masyarakat.
4. **Media Massa:** Media massa mempengaruhi sikap melalui pesan-pesan sugestif yang mengarahkan opini dan memberikan pengetahuan baru yang membentuk dasar afektif dalam penilaian individu.
5. **Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama:** Kedua lembaga ini memberikan pemahaman moral dan konsep-konsep yang mempengaruhi sikap individu terhadap berbagai hal.
6. **Faktor Emosional:** Emosi memainkan peran dalam pembentukan sikap, baik secara sementara maupun jangka panjang, tergantung pada apakah sikap tersebut merupakan respons frustrasi atau bentuk pertahanan ego.

Indikator Sikap Politik

Sikap politik merupakan kombinasi dari tiga komponen utama yang saling terkait: kognitif, afektif, dan konatif.

1. **Komponen Kognitif:** Berkaitan dengan kepercayaan dan pengetahuan seseorang mengenai objek sikap politik. Ini melibatkan ide atau gagasan mengenai sifat atau karakteristik umum objek tersebut yang dibentuk dari pengalaman dan informasi yang diterima. Komponen ini mempengaruhi bagaimana seseorang memahami dan mengharapkan objek politik.
2. **Komponen Afektif:** Merupakan perasaan subjektif dan emosional seseorang terhadap objek sikap politik. Ini mencerminkan bagaimana seseorang merasakan dan menghubungkan diri dengan objek tersebut secara emosional.
3. **Komponen Konatif:** Menunjukkan kecenderungan perilaku atau tindakan seseorang terkait objek sikap politik. Kecenderungan ini didasari oleh kepercayaan dan perasaan yang mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak atau berperilaku dalam konteks politik.

Ketiga komponen ini bersama-sama membentuk sikap politik yang utuh. Sikap politik dapat berubah seiring waktu karena pengaruh dari berbagai faktor internal dan eksternal.

Konsep Perempuan dalam Politik

Dalam konteks politik, perempuan sering dikaitkan dengan ciri-ciri tertentu seperti keibuan, emosionalitas, dan ketergantungan, seperti yang dijelaskan oleh Subhan (2015). Namun, kesetaraan politik antara laki-laki dan perempuan adalah prinsip utama yang harus diupayakan. Kesetaraan politik mencakup hak dan kewajiban yang setara dalam partisipasi politik, seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menjamin persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik juga menekankan hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang bebas dan adil, dengan hak pilih yang sama dan universal (Haboddin, 2016).

Penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana sikap politik perempuan dibentuk dan dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas, dengan menekankan pada dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi partisipasi dan peran perempuan dalam politik.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris mengenai ada atau tidaknya hubungan antara sikap politik dengan partisipasi politik perempuan pada Pemilu Legislatif (PILEG) 2019 di Srengseng Kembangan Jakarta Barat. Dengan menggunakan metode korelasional.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksplanatif dengan menggunakan kuisioner dan angket terstruktur. Penelitian kuantitatif eksplanatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antar variabel melalui data numerik dan analisis statistik. Menurut Sugiyono (2011), metode ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan menjelaskan posisi serta hubungan variabel yang diteliti. Yusuf (2014) menambahkan bahwa pendekatan ini juga berfungsi untuk memahami mekanisme di balik hubungan tersebut dan memperluas teori yang ada. Sehingga, penelitian kuantitatif eksplanatif fokus pada pengujian hubungan variabel untuk menghasilkan penjelasan yang dapat digeneralisasi.

Penelitian ini dilakukan pada di RT. 003/ RW.005 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat.

Populasi dan Sampel

Menurut Sudaryono (2016: 70), Penelitian populasi dikenakan apabila subjek yang akan diteliti jumlahnya terbatas. Populasi berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk diteliti. Populasi penelitian ini adalah perempuan yang terdaftar di DPT dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 70, 71, 72, dan 73 serta berdomisili di RT. 003/005 Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Dengan demikian, jumlah populasi adalah 84 orang dari keseluruhan populasi yang berjumlah 421 orang.

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*, dikatakan *simple* karena pengambilan anggota dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. (Sugiyono 2011, p. 130). Mengingat jumlah populasi yang cukup besar, jika menurut Bougie & Sekaran (2019, pp. 268-269), bahwa ukuran populasi dapat mempengaruhi keputusan pengambilan sampel. Secara umum, populasi dianggap "besar" jika ukurannya melebihi 500 individu, karena jumlah tersebut sudah cukup besar untuk mengharuskan pengambilan sampel yang representatif. Sebaliknya, populasi dianggap "kecil" jika jumlahnya di bawah 30 individu, yang memungkinkan peneliti untuk melakukan sensus atau mengambil seluruh populasi sebagai sampel tanpa perlu teknik sampling yang kompleks. Maka berdasarkan teknik tersebut ditentukan populasi terjangkau yaitu 20% untuk dijadikan sampel pada penelitian. Dengan demikian terdapat sampel penelitian dengan jumlah 84 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui Instrumen penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien agar peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang diukur. Angket dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok seseorang tentang fenomena sosial. Skala *Likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Tabel Skala *Likert*

Pilihan Jawaban	SS	S	N	TS	STS
Positif	5	4	3	2	1
Negatif	1	2	3	4	5

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji instrument (validitas dan reliabilitas), uji normalitas, uji linearitas (uji keberartian regresi, uji regresi linear sederhana), uji hipotesis (korelasi *product moment*, uji-t dan koefisien determinasi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti diketahui tentang hubungan sikap politik dengan partisipasi politik perempuan.

1. Uji Instrumen

a) Validitas

Tabel 3. Validitas pernyataan instrumen penelitian untuk variabel Sikap Politik (X) dan Partisipasi Politik Perempuan (Y)

Variabel	Jumlah Pernyataan Valid	Jumlah Pernyataan Tidak Valid/Drop
Sikap Politik (X)	35	15
Partisipasi Politik Perempuan (Y)	38	12

Dari hasil uji validitas, ditemukan bahwa dari 50 pernyataan untuk variabel Sikap Politik (X), 35 pernyataan valid dan 15 tidak valid. Sedangkan untuk variabel Partisipasi Politik Perempuan (Y), dari 50 pernyataan, 38 pernyataan valid dan 12 tidak valid. Hasil ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat validitas yang baik.

b) Reliabilitas

Tabel 4. Hasil uji reliabilitas untuk kedua variabel

Variabel	r_{hitung}	Kriteria
Sikap Politik (X)	0,90	Reliabel (Sangat Tinggi)
Partisipasi Politik Perempuan (Y)	0,92	Reliabel (Sangat Tinggi)

Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai r_{hitung} untuk Sikap Politik (X) sebesar 0,90 dan untuk Partisipasi Politik Perempuan (Y) sebesar 0,92. Dengan indeks interpretasi yang sangat tinggi, kedua instrumen dinyatakan reliabel dan dapat dipercaya.

2. Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil uji normalitas menggunakan uji Liliefors

Variabel	L_{hitung}	$L_{tabel} (\alpha = 0,05)$
Sikap Politik (X)	0,089	0,097
Partisipasi Politik Perempuan (Y)	0,086	0,097

Nilai L hitung untuk variabel Sikap Politik (X) adalah 0,089 dan untuk variabel Partisipasi Politik Perempuan (Y) adalah 0,086, yang keduanya lebih kecil dari L_{tabel} sebesar 0,097. Ini menunjukkan bahwa data untuk kedua variabel berdistribusi normal.

3. Uji Linearitas

a) Keberartian Regresi

Tabel 6. Hasil uji keberartian regresi

Statistik	Nilai	F_{tabel}
F_{hitung}	18,529	3,96

Penjelasan: Hasil perhitungan uji keberartian regresi menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 18,529, yang lebih besar dari F_{tabel} sebesar 3,96. Dengan demikian, hipotesis H^0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel Sikap Politik (X) dan Partisipasi Politik Perempuan (Y) signifikan.

b) Regresi Linear Sederhana

Tabel 7. Hasil regresi linear sederhana

Koefisien	Nilai
Konstanta	46,118
Sikap Politik (X)	0,584

Persamaan regresi linear yang diperoleh adalah $Y = 46,118 + 0,584X$. Nilai signifikansi variabel independen adalah 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara Sikap Politik (X) dan Partisipasi Politik Perempuan (Y).

4. Uji Hipotesis

a) Korelasi Product Moment

Tabel 8. Hasil uji korelasi Pearson

Koefisien Korelasi	Nilai	R _{tabel}
R	0,429	0,215

Nilai koefisien korelasi Pearson (R) adalah 0,429, yang lebih besar dari r_{tabel} sebesar 0,215. Ini menunjukkan adanya korelasi positif antara Sikap Politik (X) dan Partisipasi Politik Perempuan (Y) yang signifikan.

b) Uji-t

Tabel 9. Hasil uji-t

Statistik	Nilai	t _{tabel}
t _{hitung}	4,305	1,989

Nilai t_{hitung} adalah 4,305, yang lebih besar dari t_{tabel} 1,989 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel Sikap Politik (X) dan Partisipasi Politik Perempuan (Y). Hipotesis H⁰ ditolak.

c) Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil uji koefisien determinasi

Koefisien Determinasi	Nilai
r ²	0,184

Koefisien determinasi sebesar 0,184 menunjukkan bahwa 18,4% variasi dalam Partisipasi Politik Perempuan (Y) dapat dijelaskan oleh Sikap Politik (X). Menurut Guilford (1946), nilai ini berada dalam rentang 17% - 49% yang diinterpretasikan sebagai cukup berarti.

Dari hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara Sikap Politik dan Partisipasi Politik Perempuan. Sikap politik yang lebih positif cenderung meningkatkan partisipasi politik perempuan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terbukti valid dan reliabel, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan atau penerapan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan politik perempuan.

PENUTUP

Sikap politik, terutama pada perempuan, menjadi variabel yang sangat penting dalam menjelaskan partisipasi politik mereka. Seiring dengan dinamika politik yang terus berubah, sikap politik memainkan peran sentral dalam menentukan bagaimana perempuan terlibat dalam proses politik, terutama dalam konteks pemilihan umum. Hal ini disebabkan oleh keragaman nilai dan preferensi politik di antara pemilih, di mana perempuan harus memilih berdasarkan preferensi politik pribadi mereka sendiri. Namun, preferensi politik tidak terbentuk secara spontan; mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk proses dialog politik, diskusi politik, dan interaksi sosial. Pentingnya sikap politik yang berpikir kritis dalam konteks partisipasi politik perempuan menjadi semakin jelas. Sikap politik yang kritis memungkinkan perempuan untuk secara aktif terlibat dalam proses politik dengan cara yang berarti dan memengaruhi. Dalam konteks pemilihan umum, ini dapat tercermin dalam partisipasi aktif dalam kampanye politik, pemungutan suara, atau bahkan keterlibatan langsung dalam aktivitas politik seperti menjadi anggota partai politik atau kandidat.

Penelitian yang dilakukan menyoroti korelasi antara sikap politik dan partisipasi politik perempuan dalam konteks Pemilu Legislatif 2019 di sebuah wilayah tertentu, yaitu RT 003/ RW 005 Srengseng Kembangan Jakarta Barat. Sikap Politik merupakan salah satu faktor utama dalam Partisipasi Politik Perempuan dengan korelasional sebesar 18,4%. Dengan memperhatikan hasil perhitungan tersebut maka H_0 ditolak, sedangkan H_a diterima. Ini berarti semakin tinggi Sikap Politik Perempuan, maka semakin tinggi Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2019. Terdapat hubungan yang signifikan antara Sikap Politik dan Partisipasi Politik Perempuan dengan hasil Uji Korelasi Pearson Moment dalam penelitian ini sebesar 0,429. Dengan tingkat hubungan yang sedang karena termasuk kedalam koefisien korelasi 0,40 – 0,5999 dan juga terdapat hubungan positif Sikap Politik terhadap Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2019 di RT 003/ RW 005 Srengseng Kembangan Jakarta Barat. Hal ini ditunjukkan dalam uji korelasi Pearson sebesar $0,429 > 1,66$ untuk 84 responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. (2013). *Sikap manusia: Teori dan pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bougie, R., & Sekaran, U. (2019). *Research methods for business: A skill-building approach*. John Wiley & Sons.
- Budiarjo, M. (2015). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.
- Cholisin, & Nasiwan. (2012). *Dasar-dasar ilmu politik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Damsar. (2010). *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: Kencana.
- Guilford, J. P. (1946). New standards for test evaluation. *Educational and psychological measurement*, 6(4), 427-438.
- Haboddin, M. (2016). *Pemilu dan partai politik di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Khoirudin. (2010). *Partai politik dan agenda demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



- Rahardiansah, T. (2012). *Pengantar ilmu politik* (4th ed.). Jakarta: Universitas Trisakti.
- Subhan, Z. (2015). *Al-Quran dan perempuan: Menuju kesetaraan gender dalam penafsiran*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.
- Suryono, H. (2013). *Pemberdayaan masyarakat di era global*. Bandung: Alfabeta.
- Widiyanto, M. A. (2013). *Statistika terapan: Konsep & aplikasi SPSS dalam penelitian bidang pendidikan, psikologi & ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wiranggani, P. (2017). *Demokrasi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.